

BAB II

KARAKTERISTIK POLITIK LUAR NEGERI, DAN HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN RUSIA PASCA PERANG DINGIN

Pasca Perang Dingin, hubungan AS dan Rusia berjalan cukup dinamis. Ketegangan ideologi kapitalis dan komunis yang telah lenyap menjadikan AS dan Rusia dapat menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang. Selain itu, kondisi ekonomi Rusia yang terpuruk pasca Uni Soviet juga membuka peluang bagi terjalannya kerjasama ekonomi yang erat dengan AS. Namun, meskipun demikian ketegangan antara AS dengan Rusia ternyata masih sering terjadi. Perbedaan pandangan yang lahir dari karakteristik politik luar negeri AS dan Rusia menjadikan hubungan konfrontatif pun tidak terelakkan. Oleh karena itu, pasca Perang Dingin, hubungan AS dengan Rusia telah sepenuhnya membaik.

Untuk mendapatkan gambaran dari pola hubungan Amerika Serikat dengan Rusia pasca Perang Dingin, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai karakteristik politik luar negeri kedua negara, serta dinamika yang terjadi dalam hubungan AS dengan Rusia pasca Perang Dingin.

A. Karakteristik Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Konsep politik luar negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk mengatasi masalah sekaligus mencari keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri suatu negara pasti di ambil berdasarkan kepentingan nasional negara itu sendiri

meskipun ia dilakukan dengan dalih tertentu seperti kepentingan bersama. Politik luar negeri Amerika Serikat pun demikian. Meski dilakukan dengan dalih apapun, pada dasarnya hal itu dilakukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri.

Fokus politik luar negeri Amerika Serikat dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan lainnya memang tidak selalu sama. Selalu ada perbedaan dalam masing-masing pemerintahan. Namun secara umum, ada tiga tujuan dasar yang selalu hadir dalam setiap kebijakan luar negeri AS, meskipun dalam tingkat fokus yang berbeda dari waktu ke waktu. Ketiga tujuan tersebut adalah:

1) Menyebarluaskan demokrasi

Usaha menyebarluaskan demokrasi adalah sebuah kepentingan yang sangat umum kita temui ketika menelaah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan AS sendiri adalah sebuah negara yang kita kenal atau setidaknya mengklaim dirinya sebagai "*champion of democracy*" (juara demokrasi) dan "*the guardian of democracy*" (pengawal demokrasi). AS sendiri memang telah memiliki tradisi demokrasi yang kokoh sejak diproklamirkannya Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776.

Berakhirnya Perang Dingin menandai kemenangan demokrasi atas komunisme. Hal ini menjadikan demokrasi sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Dengan kemenangan tersebut Amerika Serikat kian bersemangat dalam menggembar-gemborkan pentingnya penyelenggaraan demokrasi terhadap masyarakat dunia. Bill Clinton, sebagai presiden pertama yang memimpin Amerika Serikat pasca Perang Dingin pun menunjukkan bahwa mempromosikan demokrasi

adalah salah satu tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bahkan dinyatakan bahwa semua kepentingan strategis Amerika Serikat dalam politik luar negerinya bergantung pada keberhasilan promosi demokrasi ini sebagaimana disebutkan dalam *A National Security Strategy of Engagement And Enlargement*:

All of America's strategic interest — from promoting prosperity at home to checking global threats abroad before they threaten our territory — are served by enlarging the community of democratic and free market nation. Thus, working with new democratic states to help preserve them as democracies committed to free market and respect for human rights, is a key part of our national security strategy.¹

Hingga saat ini, penyebaran demokrasi masih terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam terus berusaha melakukan demokratisasi untuk menciptakan kebebasan individu dan transparansi dalam institusi-institusi pemerintahan di suatu negara demi memperluas komunitas demokrasi di dunia. Dengan demikian akan tercipta lingkungan eksternal yang demokratis yang mampu menunjang kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini dikarenakan negara yang demokratis cenderung mendukung dan mudah bekerjasama dengan Amerika Serikat. Dalam laporan *national security strategy* yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Barack Obama disebutkan bahwa:

"The United States supports the expansion of democracy and human rights abroad because governments that respect these values are more just, peaceful, and legitimate. We also do so because their

¹ The White House, *A National Security Strategy of Engagement And Enlargement*, Washington DC, 1994, hal. 18. Diunduh 31 Desember 2014 dari <http://nssarchive.us/NSSR/1994.pdf>

success abroad fosters an environment that supports America's national interests."²

Hal ini membuktikan bahwa dalam beberapa periode pemerintahan yang berbeda, usaha menyebarkan demokrasi selalu menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya setelah Perang Dingin berakhir. Sebagai contoh, keterlibatan Amerika Serikat dalam *Rose Revolution* di Georgia pada tahun 2003, dan *Orange Revolution* di Ukraina pada tahun 2004 dimana kedua kejadian tersebut memiliki satu isu yang diangkat yakni demokrasi.

2) Keamanan Militer

Tidaklah sulit untuk mengidentifikasi tujuan yang satu ini dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar, tidak mengherankan jika kepentingan keamanan selalu ada dalam setiap kebijakan luar negeri AS. AS selalu berusaha untuk memiliki keamanan, kebebasan, dan merdeka dari segala bentuk pengaruh maupun invansi dari luar. Untuk itu AS merasa perlu memiliki kekuatan militer yang selalu siaga untuk menghadapi segala ancaman yang datang dari luar. Hal ini tercantum pula dalam *U.S. National Security of Engagement and Enlargement* yang berbunyi:

*"To enhance our security with military forces that are ready to fight and with effective representation abroad."*³

² The White House, *Natonal Security Strategy*, Washington DC, 2010, hal. 37. Diunduh 26 November 2014 dari: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf

³ The White House, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement*, Washington DC, 1996. Diunduh 26 November 2014 dari <http://nssarchive.us/NSSR/1996.pdf>

states and use leverage with the major powers where it has it . . . but it does not seek confrontation with them . . . The ambition of the present leadership, supported by majority of the electorate, is to re-establish Russia as a strong, independent, and unfettered actor on the global stage."²⁷

Rusia menyatakan bahwa pihaknya lebih identik dengan sikap defensif dan independen daripada sifat agresif dan ekspansionis. Rusia akan menggunakan berbagai macam tekanan terhadap negara tetangganya dan mengingatkan kepada negara besar lain (khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Barat) tentang apa yang telah terjadi di masa lalu jika itu diperlukan. Namun menurut Rusia hal tersebut tidak ditujukan untuk berkonfrontasi dengan mereka melainkan untuk mengembalikan posisi Rusia sebagai negara yang kuat, berdaulat, dan sebagai aktor yang tidak tergoyahkan dalam panggung global.

5) Melindungi bangsa Rusia yang berada di luar Rusia

Bangsa Rusia tersebar di berbagai negara, khususnya negara yang pernah termasuk dalam pengaruh dan kontrol Uni Soviet. negara-negara seperti Latvia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Estonia, Ukraina, Abkhazia, Uzbekistan, Lithuania, Moldova, Belarusia, dan Georgia, adalah tempat dimana bangsa Rusia, keturunan Rusia, dan penduduk yang berbahasa Rusia berukim. Hal tersebut

²⁷ Jeffrey Mankoff, *Op. Cit.* Hal. 22

dijadikan sebagai objek yang harus dilindungi serta merupakan bagian dari apa yang disebut oleh Putin sebagai 'dunia Rusia'.²⁸ Putin mengatakan:

“Jutaan rakyat Rusia tidur di satu negara (Uni Soviet) dan terbangun di negara lain. Rakyat Rusia telah menjadi salah satu bangsa terbesar, bahkan mungkin bangsa terbesar di dunia, yang terbagi-bagi.”²⁹

Kremlin memproklamkan diri sebagai pelindung rakyat Rusia yang tersebar di berbagai negara setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia ingin melindungi warga negaranya yang berada di luar Rusia dari berbagai macam permasalahan termasuk permasalahan yang terjadi di negara lain. Medvedev menjelaskan:

“Prioritas kita yang pasti adalah pembelaan hidup dan martabat manusia warga negara kita dimanapun mereka berada. Inilah dasar kebijakan luar negeri kita. Kita akan juga melindungi kepentingan kaum usahawan kita di luar negeri. Dan semua harus paham – kalau siapapun membuat serangan agresif, pastilah akan dibalas.”³⁰

Dengan karakteristik politik luar negeri Rusia yang demikian, jika dikaitkan pada arah kebijakan Rusia terhadap Amerika Serikat maka dapat kita pahami bahwa Rusia membuka diri untuk terjalinnya hubungan kerjasama namun Rusia tidak pernah mau mengakui Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang berhak mendominasi dunia. Rusia ingin memelihara struktur multipolar dimana ia dipahami sebagai *great power* yang ada dalam struktur tersebut disamping Amerika Serikat dan

²⁸ Rusia Beyond The Headlines, *Era Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia Setelah Perang Dingin*, *Op. Cit*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia, *Op. Cit*.

sekutu baratnya. Selain itu, Rusia juga tidak akan segan memandang kehadiran Amerika Serikat di Eropa Timur sebagai sebuah ancaman dan mengambil tindakan apabila hal tersebut dapat mengganggu pengaruh Rusia terhadap tetangga tradisionalnya, membawa kepentingan aliansi militer seperti NATO, dan membuat konflik-konflik yang membahayakan bangsa Rusia yang berada di Eropa Timur.

C. Hubungan Amerika Serikat Dengan Rusia Pasca Perang Dingin

Hubungan Amerika Serikat dengan Rusia pasca Perang Dingin diprediksi akan lebih cenderung pada hubungan kerjasama. Kondisi Rusia ketika baru menjadi negara federasi yang masih labil tidak memungkinkan lagi untuk melakukan konfrontasi. Selain itu, demokratisasi yang telah berjalan di Rusia membuat Amerika Serikat yakin untuk mengawal proses demokratisasi di Rusia demi mewujudkan Eropa yang tidak terbagi dan tatanan dunia yang lebih demokratis. Namun pada kenyataannya, dalam perjalanan hubungan keduanya hingga saat ini, kedua negara sering menemui jalan buntu ketika politik luar negeri masing negara saling memiliki ketidak sesuaian yang pada akhirnya menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia pun berjalan cukup dinamis. Ada saat-saat dimana AS dan Rusia menjalin kesepakatan dan kerjasama, namun ada pula saat dimana mantan seteru ini tidak dapat menerima politik luar negeri satu sama lain terkait isu-isu yang terjadi. Dinamika ini sedikit banyak dipengaruhi oleh periode pemerintahan yang berjalan, keadaan domestik, serta isu yang sedang dihadapi oleh masing-masing negara.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Rusia dalam tiga era kepemimpinan presiden Amerika Serikat yang berbeda.

C.1. Era Bill Clinton (1994-2001)

Bill Clinton merupakan presiden yang pertama memimpin Amerika Serikat pasca berakhirnya Perang Dingin. Sebagai presiden yang berasal dari Partai Demokrat, kebijakan luar negeri Bill Clinton tidak terlalu bersifat militeristik meskipun tidak pula dapat dikatakan bahwa kebijakan militer dilepaskan begitu saja pada era kepemimpinannya. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Bill Clinton cenderung lebih berorientasi pada ekonomi, dan lebih memilih jalan kerjasama serta diplomasi dalam usaha mencapai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat. Kerjasama perdagangan dan integrasi ekonomi digunakan sebagai jembatan untuk menuju keamanan serta kemakmuran bersama.³¹

Pada saat Bill Clinton menjabat sebagai presiden, Hubungan Amerika Serikat dan Rusia berjalan cukup baik dan hanya menemui sedikit gejolak yang berarti. Hal ini dirasa wajar karena kebijakan Bill Clinton yang memang lebih mengutamakan ekonomi dan tidak bersifat militeristik. Selain itu, dengan *Containment Policy* yang tidak lagi menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet, memberikan ruang bagi Clinton untuk menggalakkan kebijakan ekonominya. Selain faktor tersebut, hubungan baik antara Amerika Serikat

³¹ Sri Winingsih, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran*, Tesis dipublikasikan. Jakarta: FISIP UI, 2009, hal 5. Diunduh 10 Januari 2015 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Pendahuluan.pdf>

dan Rusia pada saat itu juga ditentukan oleh keadaan Rusia pada era pemerintahan Boris Yeltsin. Boris Yeltsin memiliki kecenderungan yang besar terhadap Barat dan Amerika Serikat.³² Ia juga memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan demokrasi liberal di Rusia serta pandangan yang senada dengan Clinton yakni mengutamakan bidang ekonomi di negaranya masing-masing.

Selama masa pemerintahan Yelstin, Rusia mengalami keterpurukan di bidang politik, militer, dan terutama ekonomi. Laju inflasi dan resesi menjadi musuh yang benar-benar melumpuhkan perekonomian Rusia saat itu. Selama itu pula Yeltsin menghadapi perlawanan dari oposisi di parlemen yang menentang program reformasi ekonomi besarnya yang semakin meningkatkan laju inflasi. Bill Clinton, dalam pertemuannya dengan Yeltsin di Vancouver pada tahun 1993, berjanji untuk memberikan dukungan yang kuat kepada Yeltsin dalam bentuk bantuan finansial untuk memajukan beberapa program, termasuk bantuan dana untuk stabilisasi ekonomi. Kongres Amerika Serikat, termasuk dua partai mayoritas dalam senat, menyetujui kebijakan Clinton tersebut pada September 1993.³³

Hubungan baik Washington dan Moskow dalam bidang ekonomi dan politik juga ditunjukkan dengan bergabungnya Rusia pada grup G-7 atas rekomendasi Bill Clinton pada tahun 1997. Ajakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung perekonomian Rusia serta untuk membantu perkembangan institusi demokrasi di Rusia. Sehingga setelah bergabung dengan raksasa-raksasa ekonomi yang

³² Muhammad Ali Bustomi, *Op. Cit.* hal. 30

³³ Office of The Historian, '*Bill Clinton, Boris Yeltsin, and U.S.-Russian Relations*', <https://history.state.gov/milestones/1993-2000/clinton-yeltsin>, diakses 4 Januari 2015.

demokratis, diharapkan demokrasi akan semakin menancap kuat di Rusia.³⁴ Clinton berharap kesepakatan tersebut akan mengubur Perang Dingin untuk selamanya.

Kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia pada masa pemerintahan Bill Clinton juga terwujud dalam keberhasilan diplomasi Clinton dan Yeltsin dalam mewujudkan apa yang dimaksudkan dalam perjanjian *Intermediate – Range Nuclear Force* (INF) dan *Strategic Arms Reduction Talks Treaty* (START) pada tahun 1994. Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan akhirnya mematuhi perjanjian tersebut dengan mengurangi jumlah senjata nuklir. Khusus untuk Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan, ketiga negara ini harus menghancurkan atau mengirim semua sisa persenjataan nuklir Uni Soviet ke Rusia.³⁵ Kedua perjanjian tersebut sebenarnya telah dibuat pada era Perang Dingin masing-masing pada 1987 dan 1991. Namun baru benar-benar bisa dijalankan setelah Amerika Serikat dan Rusia masing-masing dipimpin oleh Bill Clinton dan Boris Yeltsin.

Masa-masa indah hubungan Amerika Serikat dan Rusia tersebut terganggu oleh isu keamanan yang melanda di benua Eropa. Masalah-masalah keamanan itu diantaranya adalah Konflik Bosnia, Perang Chechnya, dan konflik Kosovo. Clinton keberatan dengan aksi Rusia yang menginvasi Chechnya yang ingin melepaskan diri dari Rusia, dan Yeltsin keberatan atas intervensi Amerika Serikat di Bosnia, termasuk serangan udara NATO yang dilakukan disana. Kesepakatan Dayton yang mengakhiri kekerasan di Bosnia, dan Persetujuan Khasyavyurt yang mengakhiri Perang

³⁴ CNN All Politics, 'Clinton, Yeltsin Meet Today At Denver Summit', <http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1997/06/20/summit.roundup/>, diakses 4 Januari 2015

³⁵ Office of The Historian, *Op. Cit*

Chechnya Pertama ternyata tidak dapat mengurangi tensi yang mulai tumbuh kembali antara Amerika Serikat dan Rusia.³⁶ Pada tahun 1999, tiga negara bekas satelit Uni Soviet yakni Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko resmi bergabung dengan NATO. Sebuah kenyataan yang tidak menyenangkan bagi Rusia. Selanjutnya, kurang dari dua minggu setelah bergabungnya tiga negara tersebut, NATO membombardir Serbia, sekutu Rusia, terkait Konflik Kosovo³⁷ dimana dalam konflik tersebut Amerika Serikat mendukung Kosovo yang ingin memisahkan diri dari Serbia, sementara Rusia mendukung Serbia yang menolak memerdekakan Kosovo. Meskipun ketegangan antara AS dan Rusia sempat kembali muncul sebagai akibat permasalahan tersebut, namun konfrontasi dalam wujud nyata sulit untuk terjadi karena keadaan internal Rusia yang serba sulit dan sangat membutuhkan AS dan negara Barat.

Meskipun ketegangan kembali tercipta di balik masa-masa kerjasama yang sudah mulai tercipta antara Amerika Serikat dan Rusia, Clinton tetap memuji hubungannya dengan Yeltsin sebagai awalan yang bagus dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Clinton mengatakan: "Tentu saja, kita juga mempunyai perbedaan. Namun hal yang utama dalam hubungan kita adalah bagaimana Rusia dan Amerika dapat bekerja bersama untuk mencapai kepentingan bersama".³⁸ Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Rusia pada era pemerintahan

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Bill Clinton cenderung bersifat kooperatif dan mengutamakan pendekatan *soft power* melalui diplomasi dan hubungan kerjasama.

C.2. Era George W Bush (2001-2009)

George W. Bush adalah presiden yang terpilih dari Partai Republik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era kepemimpinan Bush terlihat lebih agresif dan militeristik jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Amerika Serikat juga lebih sering bersikap unilateral dalam menanggapi permasalahan negerinya serta dalam pengejaran kepentingan nasionalnya. Karakteristik seperti ini juga berlaku untuk hubungan Amerika Serikat dan Rusia dimana hal seperti ini membuat ketegangan kembali mewarnai dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Rusia. Selain itu, ketika Bush menjadi presiden AS, Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin telah meraih kembali kejayaan dengan meningkatnya perekonomian melalui sektor energi, serta pemerintahan yang kokoh dengan penataan ulang sistem pemerintahan. Hal tersebut turut menjadi penunjang bagi buruknya prospek hubungan AS dan Rusia di era pemerintahan Bush.

Segera setelah terjadinya peristiwa 9/11 pada tahun 2001 ketika Bush dan Putin sama-sama baru menjabat sebagai presiden, Putin menjadi presiden pertama di dunia yang menyampaikan dukungan kepada Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Dengan deklarasi solidaritas Putin kepada Amerika Serikat tersebut, Bush dengan khidmat mengumumkan bahwa hal tersebut merupakan fajar baru bagi

kemitraan strategis Amerika Serikat dengan Rusia.³⁹ Namun hal tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diperkirakan. Kedua pihak merasa dikecewakan oleh kebijakan luar negeri masing-masing. Amerika Serikat kecewa dengan memburuknya iklim demokrasi di Rusia dan tumbuhnya authoritarianisme dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Putin dan Medvedev yang mengembalikan kekuatan besar negara untuk menegakkan aturan main. Disamping itu, kekecewaan AS juga timbul dari politik luar negeri Rusia yang agresif terhadap negara-negara tetangganya yang juga bekas anggota Uni Soviet. Di sisi lain, Rusia kecewa dan merasa dihianati oleh Amerika Serikat yang dianggap meneruskan *Containment Policy* ditengah-tengah deklarasi mereka yang menyatakan bahwa Perang Dingin hanyalah ukiran masa lalu. Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung ekspansi NATO hingga ke negara-negara bekas anggota Uni Soviet untuk dapat melakukan instalasi persenjataan anti rudalnya di Eropa Timur. Amerika Serikat juga membangun jalur pipa dengan menghindari wilayah teritori Rusia untuk mendapatkan minyak dari Laut Kaspia bagi AS dan negara-negara Eropa Barat. Hal-hal tersebut merupakan bukti bagi Rusia bahwa AS melihat Rusia sebagai saingan yang berpotensi menjadi bahaya untuk AS daripada sebagai rekan.⁴⁰

Pemikiran Bush yang militeristik terlihat dengan keinginannya membawa AS menarik diri dari perjanjian ABM (*Antibalistic Missile*) pada masa awal jabatannya. Namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Rusia menggunakan ABM sebagai syarat untuk meratifikasi START II dan menandatangani SORT (*Strategic*

³⁹ Jeffrey Mankoff, *Op. Cit* hal 97

⁴⁰ *Ibid* hal. 98

Offensive Treaty).⁴¹ Hal yang sama juga terlihat dari kebijakan Bush dalam mendukung ekspansi NATO di Eropa Timur. Pada tahun 2004 saja, tiga negara baltik seperti Estonia, Latvia dan Lithuania, ditambah dengan empat negara Eropa Timur lainnya yakni Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia, bergabung dengan NATO.⁴² Jika ditambah dengan Albania dan Kroasia yang bergabung dengan NATO hanya tiga bulan setelah jabatan Bush berakhir pada tahun 2009, maka selama masa pemerintahannya Bush berhasil mendukung ekspansi NATO dengan menarik 9 negara Eropa Timur untuk bergabung. Kebijakan Bush tersebut membawa keresahan bagi Rusia yang takut negaranya akan dikepung oleh Barat. Dalam pertemuan puncak NATO yang diselenggarakan di Bukares pada tahun 2008, Vladimir Putin menyampaikan kegelisahannya atas ekspansi NATO. Putin mengatakan: "Munculnya sebuah aliansi militer di perbatasan Rusia bisa dilihat sebagai ancaman langsung".⁴³ Komentar Putin tersebut direspon oleh negara anggota NATO lain seperti Jerman dan Perancis dengan tidak menyetujui usulan untuk mengajak Georgia dan Ukraina demi menghindari kemarahan Rusia.

Tidak hanya masalah perluasan NATO, kebijakan agresif Bush yang semakin meningkatkan ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Rusia adalah upayanya dalam membangun sistem pertahanan anti rudal di Eropa Timur. Selama masa jabatannya, Bush terus mengupayakan kebijakan keamanan tersebut di Polandia dan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Deutsche Welle, 'Sejarah Perluasan NATO Ke Eropa Timur', <http://www.dw.de/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a-17528183>, diakses 5 Januari 2015

⁴³ *Ibid*

Republik Ceko. Karena sikap Bush tersebut, Rusia mengancam akan membalas dengan memasang peluru kendali jarak pendek tipe Iskander di Kaliningrad.⁴⁴

Selain kebijakan keamanan, di era kepemimpinan Bush konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Eropa Timur juga telah menyeret Amerika Serikat dan Rusia ke dalam perselisihan. Pada tahun 2007, Amerika Serikat berselisih dengan Rusia terkait konflik Kosovo. Kosovo pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, sekutu Rusia. Kemerdekaan Kosovo tersebut diakui dan di dukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Maret 2008, Bush mensahkan pemasokan senjata untuk Kosovo setelah republik separatis tersebut secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya. Selain itu, melalui menteri luar negeri AS saat itu, Condoleeza Rice, AS berjanji akan melanjutkan bantuan bagi Kosovo.⁴⁵ Rusia merasa sangat keberatan dengan sikap AS tersebut. Seperti halnya Serbia, Rusia sangat marah dengan pisahnya Kosovo dan tindakan Amerika serta banyak negara anggota Uni Eropa untuk mengakui negara baru itu. Moskow sependapat dengan pandangan Beograd bahwa pemisahan itu illegal karena melanggar resolusi dewan keamanan PBB yang mengakui Kosovo sebagai bagian dari wilayah Serbia. Dimitri Medvedev yang saat itu akan menggantikan Putin sebagai presiden menunjukkan

⁴⁴ Deutsche Welle, *Op. Cit.* 'Era Baru Hubungan AS dan Rusia', <http://www.dw.de/era-baru-hubungan-as-dan-rusia/a-3982803>, diakses 5 Januari 2015

⁴⁵ Kompas, 'Amerika Akan Terus Dukung Kosovo', <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/10172561/amerika.akan.terus.dukung.kosovo>, diakses 5 Januari 2015

bahwa dia tidak takut untuk melawan sikap Amerika yang menurutnya semakin agresif di perbatasan dengan Rusia.⁴⁶

Tidak berhenti sampai disitu, hubungan AS dan Rusia yang lebih panas terjadi dalam konflik Georgia-Rusia di tahun 2008. Pada saat itu, AS mendukung Georgia yang tengah berperang dengan Rusia. Georgia melancarkan invansi militer ke Ossetia Selatan karena daerah otonomi tersebut ingin memerdekakan diri dari Georgia. Rusia yang mendukung Ossetia kemudian membalas dengan menurunkan kekuatan militernya di Georgia. Tak dapat dipungkiri, Georgia yang memang bukan tandingan militer Rusia tak sanggup menghadang serangan militer Beruang Merah. Meskipun tidak ikut menurunkan pasukan militer secara langsung, namun sangat jelas dukungan yang diberikan AS untuk Georgia dalam menentang Rusia. Gedung Putih bahkan mengancam Rusia dengan *serious consequences* apabila Rusia tidak meninggalkan Georgia.⁴⁷ Hingga konflik tersebut berakhir, AS masih tetap mengecam aksi Rusia dan menyatakan dukungannya kepada Georgia.⁴⁸ Rusia sendiri, diyakini melakukan tindakan agresif tersebut dengan maksud memberikan *deterrence* bagi Amerika Serikat atas wacana Washington memasukkan nama Georgia dan Ukraina ke dalam

⁴⁶ BBC Indonesia, 'Rusia Janji Tetap Dukung Serbia', http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/02/080225_russiansupport.shtml, diakses 5 Januari 2015

⁴⁷ Devi Oftasari, *Dukungan Amerika Serikat Terhadap Georgia Dalam Konflik Rusia-Georgia Periode 2001-2010*, Jakarta: 2011, FISIP UI, hal 8. Tesis dipublikasikan.

⁴⁸ Deutsche Welle, 'Presiden AS Kecam Pertempuran di Georgia', <http://www.dw.de/presiden-as-kecam-pertempuran-di-georgia/a-3562832>, diakses 23 September 2014

daftar nama negara yang akan menjadi anggota NATO dalam pertemuan puncak di Bukares pada tahun 2008.⁴⁹

Serangkaian konflik dan ketegangan yang kembali terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia di era pemerintahan George W. Bush menggambarkan pada kita bahwa dalam periode tersebut hubungan AS dan Rusia cenderung konfrontatif dan sarat dengan isu-isu militer.

C.3. Era Barack Obama (2009-Sekarang)

Dalam masa kepemimpinan Obama, tujuan utama politik luar negeri Amerika Serikat kembali mengalami perubahan. Pijakan militer yang hampir satu dekade dilewati dalam masa presiden Bush kini tidak lagi menjadi pijakan utama Amerika Serikat. Prioritas dalam kebijakan luar negeri Barack Obama adalah untuk membenahi hal-hal yang ada di dalam negeri terlebih dahulu seperti perekonomian, kehidupan sosial, dan politik. Selain itu Obama juga menekankan betapa pentingnya untuk mengembalikan reputasi AS di mata dunia setelah melalui masa-masa kebijakan militeristik yang berlebihan.

Seminggu setelah pelantikan Presiden Barack Obama di tahun 2009, ketegangan antar Amerika Serikat dan Rusia menurun. Keputusan Obama untuk mengkaji ulang dan menanggihkan proyek penempatan peralatan pertahanan anti rudal di Eropa Timur yang digagas oleh Bush mendapat respon positif dari Rusia. Moskow memutuskan untuk menunda penempatan peluru kendali jarak pendek di

⁴⁹ Devi, *Op. Cit.*, hal 7

Kaliningrad yang semula direncanakan untuk merespon kebijakan agresif Bush. Alasan penundaan tersebut, menurut seorang pejabat militer, adalah sikap pemerintah baru Amerika Serikat yang tampaknya tidak tergesa-gesa membangun sistem penangkis rudal di Eropa Timur. Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan: "Kami juga mengamati, Presiden Obama menangguhkan soal sistem penangkis rudal - antara lain karena situasi keuangan saat ini - Obama sudah menyatakan itu sebelumnya. Ia akan menganalisa proyek ini, terutama soal efisiensi serta pendanaannya. Kami berharap, Obama mempertimbangkan usulan yang diajukan Rusia. Tahun 2007 kami mengusulkan pendirian sistem bersama Rusia, Amerika Serikat dan Eropa untuk menurunkan risiko global serangan roket."⁵⁰

Pada masa awal jabatannya sebagai presiden, Obama mengupayakan hubungan baik dengan lingkungan eksternalnya terutama dengan Rusia. Upaya mengembalikan hubungan baik dengan Rusia ini dikenal dengan sebutan *Reset Relation*. Secara simbolis, penyegaran ulang hubungan Amerika Serikat dengan Rusia ini ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dengan menekan tombol *reset* yang diartikan sebagai tombol untuk memperbaharui hubungan AS dan Rusia.⁵¹ Melalui *Reset Relations*, Pemerintahan Obama berusaha untuk melibatkan Rusia dalam mencapai kepentingan luar negeri bersama dan juga menjalin hubungan langsung dengan

⁵⁰ Deutsche Welle, 'Era Baru Hubungan AS dan Rusia', <http://www.dw.de/era-baru-hubungan-as-dan-rusia/a-3982803>, diakses 5 Januari 2015

⁵¹ CNN, 'U.S. Seeks to 'Reset' Relation With Russia', <http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/03/07/us.russia/>, diakses 5 Januari 2015

masyarakat Rusia dalam rangka pemenuhan kepentingan ekonomi, meningkatkan pengertian bersama, dan memajukan nilai-nilai universal.

Era baru hubungan AS dan Rusia yang digagas pada masa kepemimpinan Barack Obama diwujudkan dengan kesepakatan AS dan Rusia untuk memperbaharui perjanjian START (*Strategic Arm Reduction Treaty*) yang telah kadaluarsa pada Desember 2009. Kesepakatan baru tersebut mengurangi jumlah peluru nuklir jarak jauh yang dapat digelar oleh masing-masing negara, dari 2.200 menjadi 1.550 peluru nuklir. Perjanjian itu juga menegaskan kembali inspeksi senjata-senjata strategis kedua negara.⁵²

Karakteristik pemerintahan Obama yang hampir sama dengan Bill Clinton dengan lebih mengedepankan diplomasi dan kerjasama, membuat hubungan Amerika Serikat dan Rusia kembali membaik. Dengan kebijakan Obama yang lebih mementingkan hubungan kerjasama dan upayanya mengembalikan citra baik Amerika Serikat di dunia, harapan akan membaiknya hubungan AS dengan Rusia kian meningkat dan menjadi tantangan besar bagi Obama.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat dan Rusia memiliki karakteristik politik luar negeri yang berbeda satu sama lain. Dan yang lebih penting lagi adalah, perbedaan tersebut berpotensi menjadi jalan buntu bagi hubungan kedua negara. Sebagai contoh, keinginan Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur dalam rangka penyebaran demokrasi, dapat berbenturan dengan Rusia

⁵² VOA Indonesia, 'Obama Tandatangani Ratifikasi Perjanjian START Dengan Rusia', <http://www.voaindonesia.com/content/obama-tandatangani-ratifikasi-perjanjian-start-115149839/89383.html>, diakses 5 Januari 2015

yang tidak ingin pengaruhnya terhadap negara Eropa Timur terganggu. Begitupun halnya dengan komitmen Amerika Serikat untuk ekspansi NATO di Eropa Timur dalam rangka upaya kemanannya, aliansinya, dan apa yang disebut sebagai *unique responsibility* oleh AS. Hal ini telah secara langsung dianggap sebagai ancaman oleh Rusia.

Potensi ketegangan yang dihasilkan oleh perbedaan tujuan dalam politik luar negeri Amerika Serikat dengan Rusia membawa hubungan kedua negara berjalan dinamis. Di antara ketiga era pemerintahan yang telah dijelaskan di atas, hubungan terbaik antara AS dan Rusia terjadi pada era pemerintahan Bill Clinton yang dibarengi dengan masa transisi Rusia di bawah pemerintahan Boris Yeltsin. Meskipun terjadi perselisihan di akhir masa pemerintahan Yeltsin, namun hal tersebut tidak berlanjut menjadi sebuah hubungan konfrontatif karena Rusia masih bergulat dengan kesulitan ekonomi dan membutuhkan AS beserta negara Barat. Hubungan AS dan Rusia menjadi lebih buruk di era pemerintahan Bush yang mana di saat bersamaan, Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin yang telah berhasil mengangkat kembali Rusia menuju kejayaan. Sikap Bush yang agresif dan militeristik berbenturan dengan sikap Putin yang keras dan tegas menolak sikap unilateralisme AS. Jika pada masa pemerintahan Yeltsin Rusia tidak dapat berbuat banyak untuk merespon tindakan AS seperti misalnya ekspansi NATO di Eropa Timur, maka pada masa pemerintahan Putin Rusia lebih berani menentang kebijakan AS yang bertentangan dengan kepentingannya. Wacana NATO untuk memberi status keanggotaan kepada

Georgia dan Ukraina, serta upaya penempatan perenjataan anti misil di Eropa Timur, dibalas oleh Rusia dengan agresi militer ke Georgia.

Prospek tentang hubungan baik Amerika Serikat dengan Rusia kembali muncul ketika Barack Obama menjabat sebagai Presiden AS. Penundaan program penempatan senjata anti rudal di Eropa Timur, *Reset Relation*, ditambah lagi dengan kembali diratifikasinya START, membawa angin segar bagi hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Seiring harapan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Rusia di era pemerintahan Barack Obama akan mengalami kemajuan, keadaan sebaliknya justru terjadi setelah pecahnya Krisis Ukraina. Krisis politik yang terjadi antara pemerintahan Viktor Yanukovych melawan pihak Oposisi Ukraina. Amerika Serikat mendukung pihak oposisi yang menginginkan Ukraina berintegrasi dengan Uni Eropa, sedangkan Rusia mendukung pemerintahan Yanukovych yang menginginkan hubungan Ukraina tetap cenderung kepada Rusia. Krisis Ukraina ini menandai kembali memburuknya hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Bahkan hubungan kali ini merupakan hubungan terburuk yang pernah terjadi antara kedua negara pasca Perang Dingin.

Ancaman kemanan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dari waktu ke waktu terus berubah. Pasca Perang Dingin, meskipun dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menghadapi ancaman dari blok komunisme, namun ia masih menghadapi ancaman dari adanya pengembangan senjata nuklir oleh negara lain, terorisme, dan berbagai konflik regional yang dapat melemahkan kekuatan AS di dunia. Terlebih lagi jika kita melihat sikap AS yang selalu merasa sebagai “polisi dunia” atau sebuah negara yang memiliki peran dalam menciptakan keamanan internasional. Oleh karena itu, kepentingan keamanan selalu dalam tujuan politik luar negeri AS seperti yang tercantum dalam *National Security Strategy* yang berbunyi:

This Administration has no greater responsibility than protecting the American people. Furthermore, we embrace America's unique responsibility to promote international security—a responsibility that flows from our commitments to allies, our leading role in supporting a just and sustainable international order, and our unmatched military capabilities.⁴

Dengan kekuatan militernya yang tak tertandingi, Amerika Serikat menganggap dirinya sebagai pelopor keamanan internasional dan memiliki kewajiban unik serta tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, Washington seringkali menekankan pentingnya komitmen terhadap aliansinya, sebagai usaha untuk menjaga kedamaian dunia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya peran AS dalam aktivitas NATO baik dari segi ekspansinya, pengembangan persenjataannya, serta peningkatan kekuatannya.

⁴ The White House, *National Security Strategy 2010*, *Op. Cit.*, hal 17. Diunduh 31 Desember 2014 dari <http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf>

3) Kesejahteraan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama yang menyangga kekuatan AS sebagai negara adidaya saat ini. Kemampuan diplomasi, kekuatan militer yang tak tertandingi, serta kemampuan amerika dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi bergantung pada kekuatan ekonomi mereka. Dalam *U.S. National Security Strategi of Engagement and Enlargement* dinyatakan bahwa:

“The strength of our diplomacy, our ability to maintain an unrivaled military, the attractiveness of our values abroad — all these depend in part on the strength of our economy.”⁵

Determinan utama dalam penggerak roda perekonomian, sekaligus sebagai faktor yang paling menonjol dalam isu ekonomi Amerika Serikat sejauh ini adalah sektor energi. Sebagai negara yang memiliki pertumbuhan industri yang sangat pesat, Amerika Serikat membutuhkan banyak energi untuk menjalankan industrinya dimana sebagian besar energi tersebut didapatkn dengan cara impor. Menurut data yang diperoleh dari *Statistical Review of World Energy*, AS merupakan negara dengan jumlah konsumsi minyak terbesar di dunia yakni dengan jumlah lebih dari 1,1 juta barel per hari.⁶ Selain itu, dalam *National Security Strategy*, Barack Obama juga menyatakan bahwa AS sangat bergantung pada suplai minyak dari luar negeri.⁷ Oleh

⁵ The White House, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement*, Washington DC, 1996. hal 26. Diunduh 26 November 2014 dari <http://nssarchive.us/NSSR/1996.pdf>

⁶ Statistical Review of World Energy, '2013 In Review', <http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/2013-in-review/oil.html>, diakses 1 Januari 2015

⁷ The White House, *National Security Strategy 2010*, *Op. Cit* hal 2

karena itu, mudah ditebak bahwa kebutuhan akan sumber daya energi cenderung akan melekat dalam tujuan politik luar negeri AS terhadap lingkungan eksternalnya.

Sebagai contohnya adalah politik luar negeri Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Georgia, Azerbaijan, dan Turki, untuk membangun pipa BTC (Baku, Tbilisi, Ceyhan).⁸ Pipa tersebut bertujuan untuk mengalirkan minyak dan gas dari Kaspia untuk dikonsumsi negara-negara Barat tanpa harus melewati Rusia. Dalam hal ini, pembangunan pipa BTC merupakan salah satu upaya AS untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Barat terhadap energy dari Rusia dengan mencari sumber lain yang bukan berasal atau tanpa melibatkan Rusia.⁹

Melihat ketiga tujuan umum politik luar negeri Amerika Serikat tersebut, jika dikaitkan dengan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Rusia pasca Perang Dingin, maka akan kita temukan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Rusia berjalan cukup dinamis. Berakhirnya Perang Dingin membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Rusia. Selain itu, keadaan Rusia yang sempat mengalami keterpurukan ekonomi pada masa awal pemerintahan Federasi membuka kesempatan untuk terciptanya hubungan kerjasama khususnya di bidang ekonomi antara Amerika Serikat dan Rusia.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Rusia sering mengalami naik turun karena tidak jarang Rusia memiliki pandangan yang bertentangan dengan AS. Rusia seringkali menjadi batu

⁸ Devi Oftasari, *Op. Cit* hal 75

⁹ *Ibid*

sandungan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat khususnya di kawasan Eropa Timur. Sebagai contoh, keinginan AS untuk mengintegrasikan seluruh negara di Eropa menjadi sebuah benua yang tidak terbagi-bagi, dan menganut demokrasi di bawah pengaruh AS¹⁰ tidak disetujui oleh Rusia. Begitu pula dengan agenda keamanan Amerika Serikat yang ingin membangun kekuatan militernya dengan memperluas jangkauan aliansi militer NATO hingga ke negara-negara bekas Uni Soviet. Rusia, baik dalam era Boris Yeltsin maupun era Vladimir Putin, tetap bergerak untuk mendapatkan pengakuan bahwa wilayah bekas Uni Soviet sebagai lingkup kepentingan prioritasnya, sementara AS tidak mengakui klaim tersebut.¹¹ Politik luar negeri AS dengan karakteristiknya yang demikian itu seringkali menghasilkan ketegangan ketika tidak sejalan dengan kepentingan Rusia.

Oleh karena itulah, pada era globalisasi seperti sekarang ini, meskipun Amerika Serikat tidak menganggap Rusia sebagai musuh utama, bahkan tidak sedikit hubungan kemitraan yang dijalin dengan Rusia, Amerika Serikat tetap menaruh perhatian dan kewaspadaan terhadap Rusia. Terlebih lagi pada masa sekarang ini dimana Vladimir Putin telah berhasil mengangkat kekuatan Rusia hingga mampu menggoyang hegemoni Amerika Serikat dan Barat di dunia.

¹⁰ The White House, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement* 1996, Op. Cit., hal 35

¹¹ Gevorg Mirzayan, 'Pakar: Rusia Bisa Jadi Musuh Bebuyutan AS', *Russia Beyond The Headlines*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/12/29/pakar_rusia_bisa_berubah_jadi_musuh_bebuyutan_as_26431.html. diakses 1 Januari 2014

B. Karakteristik Politik Luar Negeri Rusia

Pasca Perang Dingin, setelah kehancuran Uni Soviet, Rusia memulai hidup baru sebagai sebuah negara federasi dan meninggalkan sistem pemerintahan komunisme Uni Soviet menuju sistem yang demokratis. Namun, masa awal dari kehidupan Rusia yang baru tersebut tidak berjalan lancar sebagai negara yang baru terlahir kembali. Tepatnya di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin (1991-1999), Rusia mengalami keterpurukan khususnya di bidang politik, militer, dan ekonomi dimana bidang ekonomi pada saat itu merupakan bagian terparah dari kemunduran Rusia. Rusia kemudian berhasil mendapatkan posisinya dan kembali berdiri sebagai negara besar pada masa pemerintahan Vladimir Putin dan Dimitri Medvedev. Dengan adanya perbedaan keadaan yang dialami oleh Rusia dalam dua masa yang berbeda, maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan pula dalam karakteristik politik luar negeri Rusia di masa pemerintahan Yeltsin dengan Putin dan Medvedev.

B.1. Era Boris Yeltsin

Masa pemerintahan Boris Yeltsin merupakan masa transisi dalam banyak hal bagi Rusia khususnya di bidang ekonomi dan politik. Yeltsin memiliki komitmen yang sangat besar dalam hal demokratisasi dan liberalisasi ekonomi seperti yang dimiliki AS dan negara-negara Barat.¹² Bidang ekonomi yaitu perubahan dari sistem ekonomi komando ala Uni Soviet menuju ekonomi bebas dan terbuka, serta bidang

¹² Muhammad Ali Bustomi, *Diplomasi Energi Rusia Era Putin Terhadap Uni Eropa*, Tesis dipublikasikan. Jakarta: FISIP UI, 2010, hal 29-30. Diunduh 10 Januari 2015 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131592-T%2027569-Diplomasi%20energi-Tinjauan%20literatur.pdf>

liberalisasi ekonomi di Rusia. Salah satunya adalah melalui swastanisasi dan dengan membuka diri untuk masuknya produksi dan investasi dari luar.¹⁶ Kaum reformis muda seperti Yegor Gaidar, Anatoli Chubais dan Menteri Luar Negeri Andrei Kozyrev yang kesemuanya pro-pasar sengaja mengarahkan politik luar negeri Rusia ke Dunia Barat dan segala institusinya demi menyukseskan reformasi ekonomi era Yeltsin.¹⁷ Oleh karena itu, kepentingan ekonomi merupakan tujuan utama dalam agenda politik luar negeri Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin.

B.2. Era Vladimir Putin Dan Dimitry Medvedev

Ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, Rusia kemudian memiliki kebijakan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika Yeltsin lebih mengutamakan bidang ekonomi, maka Vladimir Putin lebih mengutamakan politik dan menata ulang struktur pemerintahan. Ia melucuti hak-hak pemerintah daerah, membatasi dan mengawasi kepemilikan individu, membatasi kebebasan pers untuk mengembalikan kekuatan negara agar aturan main dapat ditegakkan. Kebijakannya itu terbukti berhasil membawa Rusia merasakan kembali kejayaan sebagai negara besar setelah sempat menyandang status *weak state* pada masa pemerintahan Yeltsin.

Pada masa pemerintahan Putin dan Medvedev, dalam politik luar negerinya Rusia membuka diri untuk terselenggaranya hubungan baik dengan negara manapun di dunia. Namun berdasarkan kondisi internasional dimana Amerika Serikat dan

¹⁶ Diah Kurnia Ariningrum, *Perbandingan Politik Luar Negeri Rusia Pada Masa Pemerintahan Mikhail Gorbachev Dan Boris Yeltsin*, Skripsi dipublikasikan. Yogyakarta: FISIPOL UMY, 2009, hal 70

¹⁷ Muhammad Ali Bustomi, *Op. Cit* hal. 31

negara-negara Barat begitu mendominasi, Rusia tidak ingin kehilangan bagiannya sebagai negara besar dalam tatanan global. Setidaknya ada lima tujuan paling dominan yang dapat kita lihat dalam menjelaskan karakteristik politik luar negeri Rusia di era pemerintahan Putin dan Medveded. Kelima hal tersebut adalah:

1) Menjaga eksistensi Rusia sebagai negara besar

Rusia memberi penekanan khusus terhadap konsep *great power* dalam menterjemahkan politik luar negerinya. Eksistensi sebagai negara besar, kekuatan pengaruh, mempertahankan dan memperkuat kedaulatan, serta perimbangan kekuatannya dengan negara besar lain menjadi perhatian utama bagi Rusia. Dalam sebuah dokumen resmi yang berisi tentang prioritas politik luar negeri Rusia, Putin menyatakan:

*Promoting the interest of the Russian Federation as a great power and one of the most influential centers in the modern world [by] ensuring the country's security, preserving and strengthening its sovereignty and territorial integrity and its strong authoritative position in the world community [in order to promote] the growth of its political, economic, intellectual, and spiritual potential.*¹⁸

*"...Shaping a stable, just, and democratic world order....[based] on equitable relation of partnership among states".*¹⁹

Rusia ingin dipahami sebagai salah satu kekuatan besar dalam tatanan global yang dapat dan mampu bertindak sebagaimana yang dilakukan negara-negara besar

¹⁸ Jeffrey Mankoff, *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*, Rowman And Littlefield Publishers Inc, USA, 2009, hal 13

¹⁹ *Ibid*

lain dalam hubungan internasional. Dalam peranannya, negara-negara besar tersebut masing-masing bebas untuk mengejar kepentingannya, menghargai negara lain yang berada dalam pengaruhnya, dan mempertahankan perimbangan kekuatan dengan negara besar lainnya.²⁰ Pada intinya, Rusia ingin dianggap sebagai kekuatan serius dan diperlakukan setara dalam dunia internasional khususnya oleh AS dan negara-negara Barat.

2) Menjaga struktur multipolar

Rusia tidak menginginkan dunia hanya didominasi oleh satu negara saja. Kremlin menginginkan adanya perimbangan kekuatan antara negara-negara besar seperti AS yang selama ini dianggap memiliki pengaruh besar melebihi negara manapun di dunia. Dalam halaman resmi Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia, Dimitry Medvedev yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden Rusia (2008-2012), menjelaskan tentang kepentingan Rusia dalam menjaga perimbangan kekuatan antara *great power* tersebut. Ia mengatakan:

“Dunia harus tetap menjadi multipolar. Unipolaritas tidak dapat diterima. Dominasi tidak dapat diberi izin. Kita tidak dapat menerima tata tertib dunia di mana semua putusan diambil oleh satu negara saja, bahkan kalau negara ini adalah begitu serius dan berwibawa seperti Amerika Serikat. Dunia seperti ini adalah tidak stabil dan diancamkan sengketa.”²¹

²⁰ *Ibid* hal 12

²¹ Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia, ‘*Lima Prinsip Kebijakan Luar Negeri Rusia*’, http://www.indonesia.mid.ru/mfa_ind_02.html, diakses 10 Januari 2015

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Dimitry Suslov, asisten direktur di Pusat Studi Komperhensif Eropa dan Internasional, di Sekolah Tinggi Ekonomi Rusia yang mengatakan:

“Kami tidak setuju dengan fakta bahwa hanya satu negara yang boleh melanggar hukum internasional, atau dengan fakta bahwa hanya satu negara yang dapat mengacu pada realitas politik internasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya”²²

Keinginan Rusia untuk menjaga stuktur multipolar ini sangat erat kaitannya dengan tujuan menjaga eksistensi Rusia sebagai negara besar. Struktur multipolar adalah kunci untuk mengamankan posisi Rusia sebagai negara besar dalam tatanan global serta membantu menciptakan perimbangan kekuatan dengan negara besar lain.²³ Selain itu hal ini juga bertujuan agar Rusia tetap mampu dan memiliki hak sebagaimana negara-negara besar lain dalam mengejar kepentingannya. Keinginan untuk menjaga struktur multipolar ini memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi jika dikaitkan dengan AS mengingat Rusia menganggap AS selama ini bertindak arogan dalam mengejar kepentingannya di dunia.²⁴ Oleh karena itu, Rusia tidak menginginkan dunia ini tunduk kepada satu negara saja.

²² Russia Beyond The Headlines, ‘Era Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia Setelah Perang Dingin’, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/04/03/era_baru_kebijakan_luar_negeri_rusia_setelah_perang_dingin_23511.html, diakses 10 Januari 2015

²³ UK Essay, ‘Putin And Yeltsin Foreign Policy Application’, <http://www.ukessays.com/essays/politics/putin-and-yeltsin-foreign-policy-applications-politics-essay.php>, diakses 10 Januari 2015

²⁴ *Ibid*

3) Keamanan militer

Keamanan militer juga memiliki arti sangat penting dalam politik luar negeri Rusia khususnya di wilayah perbatasannya. Rusia tidak menginginkan adanya kekuatan militer lain yang dapat mengancam keamanannya. Seperti yang tertuang dalam *Security Concept* yang berbunyi:

*Moscow's biggest threat is the policy of some foreign state aimed at attaining an overwhelming military superiority, particularly in the area of strategic nuclear weapons, through targeted, informational, and other high-technology means of conducting armed conflict, non-nuclear strategic arms, the development of missile defenses, and the militarization of space*²⁵

Rusia sebagai negara yang pernah merasakan superioritas dalam bidang militer pada era Uni Soviet sangat menyadari bahwa kekuatan militer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam usaha pencapaian kepentingan nasional sebuah negara. Oleh sebab itu Rusia sangat mewaspadaai kekuatan militer negara lain khususnya yang melakukan aktivitas di dekat batas negaranya. NATO sebagai aliansi militer yang menjadi lawan Rusia pada masa Perang Dingin hingga kini masih berdiri dan dianggap sebagai ancaman serius bagi pertahanan keamanan dan militer Rusia. Perluasan NATO ke Eropa Timur tidak diragukan lagi memberikan keresahan bagi Rusia.

²⁵ Dale R. Hespring, *Is Military Reform in Russia For Real? Yes but..*. Dalam Stephen J Blank dan Richard Weitz, *The Russian Military Today And Tomorrow : Essay in Memory of Mary Fitzgerald, Strategic Studies*, 2010, hal 159. Diunduh 22 Oktober 2014 dari <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub997.pdf>

4) Menjaga wilayah dan kawasan kepentingan Rusia

Sebagai negara yang mewarisi superioritas Uni Soviet, dan sebagai negara yang ingin, atau merasa memiliki posisi sebagai *great power* dalam tatanan global, Rusia perlu menjaga pengaruhnya di kawasan-kawasan tertentu agar tetap terpelihara. Oleh karena itu, Rusia ingin menegaskan kepada dunia bahwa ia memiliki hak untuk menentukan wilayah-wilayah utama dimana kepentingan nasionalnya akan dicapai tanpa diganggu oleh *great power* lainnya. Dalam sebuah kesempatan Medvedev mengatakan:

“Rusia, seperti negara-negara dunia lain, menentukan kawasan-kawasan dimana kita mempunyai kepentingan istimewa. Di kawasan-kawasan itu terletak negara-negara yang secara tradisional berikatan dengan kita dengan hubungan bersahabat dan baik hati, hubungan bersejarah istimewa. Kita akan bekerja di kawasan-kawasan seperti itu dengan penuh perhatian. Dan kita akan memajukan hubungan demikian dengan negara tetangga ini.”²⁶

Suatu kawasan yang paling identik dengan apa yang dimaksud Medvedev sebagai kawasan kepentingan istimewa Rusia adalah negara-negara tetangganya di Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah yang merupakan bekas anggota Uni Soviet. Rusia merasa sangat perlu untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya di kawasan tersebut dan siap melakukan berbagai upaya. Seperti yang tertuang dalam *Trilateral Comission* yang berbunyi:

“Russia is essentially defensive and independent rather than aggressive and expansionist. Russia will use pressure of many kinds on less powerful neighboring

²⁶ Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia, *Op. Cit.*